



# AGENDA AKUNTANSI DUNIA 2026

Laporan Riset Maya Dr Jan Hoesada, Anggota  
Komja KSAP

## PENDAHULUAN

Program SDG versi PBB telah digunakan Bappenas dengan amat baik sejak tahun 2015, di dalamnya termaktub kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu bahan-baku laporan SDG versi NKRI adalah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Pemda , didalamnya termaktub kinerja tahunan KSAP.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB yang saling terkait untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semua pada tahun 2030, mencakup topik : tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak, inovasi, mengurangi ketimpangan, kota berkelanjutan, konsumsi bertanggung jawab, aksi iklim, ekosistem laut dan daratan, perdamaian keadilan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 tujuan SDG PBB tersebut di rinci menjadi 169 sasaran atau program.

SDG PBB di NKRI dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Nama asli dalam bahasa Inggris adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, implementasi SDGs/TPB diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- *SDG Indonesia One*: Sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang digagas untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan.
- SDGs Desa: Inisiatif untuk melokalisasi tujuan-tujuan global ini ke tingkat desa, dengan fokus pada pembangunan yang merata di pedesaan.
- Pelaksana utama dalam perencanaan dan pemantauan di tingkat nasional adalah BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Program ini terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015, dengan target pencapaian pada tahun 2030.

Terkait pembangunan GCG,transparansi dan akuntabilitas NKRI, kinerja KSAP diukur berdasar rencana kerja KSAP dan sasaran tahunan KSAP yang disahkan dan masuk APBN. Rencana kerja dan sasaran tahunan KSAP disusun berdasar sasaran/target jangka menengah/panjang KSAP berdasar kebutuhan bangsa cq Kabinet akan SAP termutahirkan, program kerja dan sasaran tahunan KSAP dilaksanakan berdasar strategi terpilih KSAP terbatas SD dimiliki KSAP , dengan memperhatikan derap-langkah & kondisi akuntansi global , sambil mengambil hikmah kebijakan/ kinerja negara-negara lain dalam ber-standar-akuntansi komersial & pasar-modal dan berstandar akuntansi pemerintahan. Pengetahuan

global tahunan dibawah ini berguna bagi KSAP dalam tugasnya membangun SAP NKRI nan berterima dunia.

Penulis mohon maaf atas kedangkalan tulisan dan keterbatasan sampel negara terpilih sukahati penulis , sidang pembaca di harap mencari sumber lain untuk memperkaya wawasan.

## **AGENDA IFRSB**

Akan terjadi perubahan / amandemen yang memperketat kewajiban pelaksanaan SAK Instrumen-Kuangan (IFRS 9 and IFRS 7) dan kegiatan-persiapan nan-penting untuk penimngkatan kualitas pengungkapan dan penyajian LK (IFRS 18 ) yang ditargetkan berlaku efektif tahun 2027 berpengaruh pada iklim & kesehatan Pasar-Modal di muka-bumi.

Para pembuat LK Komersial berbasis IFRS tahun 2026 wajib melaksanakan berbagai IFRS yang berlaku efektif pada 1 Januari 2026, terutama Amendments to IFRS 9 and IFRS 7 (Financial Instruments) yang memberi panduan lebih-terang tentang berbagai jenis instrumen-keuangan umumnya, khususnya untuk pembayaran hanya-pokok & bunga instrumen berfitur lingkungan-hidup, lingkungan-sosial dan fitur GCG entitas LK , penegasan kembali syarat-pembatalan-pengakuan liabilitas-keuangan yang diselesaikan via- transfer-elektronis dan pengungkapannya bagi investor pembaca LK.

Entitas LK yang memiliki atau bertransaksi dengan mata-uang tak-lazim digunakan dalam bisnis/perdagangan-global (mata-uang eksotis, exotic currency) diminta menggunakan suatu teknik-estimasi untuk menetapkan nilai-tukar tanggal-transaksi dan kewajiban pengungkapan tertentu sesuai *Amendments to IAS 21 (Lack of Exchangeability)*.

Sebagai penjelasan , mata-uang eksotis adalah istilah valuta asing untuk mata uang yang diperdagangkan dengan volume rendah atau tipis ( thin). Mata uang eksotis tidak likuid, kurang memiliki kedalaman pasar, dapat sangat fluktuatif, dan diperdagangkan dalam volume rendah. Perdagangan mata uang eksotis mungkin-saja mahal, karena selisih harga beli dan jual biasanya besar untuk mengimbangi kurangnya likuiditas. Mata uang eksotis tidak dianggap sebagai mata uang utama karena tidak mudah diperdagangkan di pasar valuta asing, apalagi di rekening pialang standar. Selain itu, mata uang eksotis biasanya identik dengan negara berkembang atau negara dengan pasar negara berkembang dan seringkali dikenakan kontrol nilai tukar sebagian atau total yang membuatnya tidak dapat dikonversi . Contoh mata uang eksotis antara lain baht Thailand, peso Meksiko , dan riyal Arab Saudi.<sup>1</sup>Di sisi lain, mata uang utama meliputi dolar AS, euro, dolar Kanada, dan franc Swiss—semuanya berasal dari negara-negara maju dengan perekonomian besar dan hubungan perdagangan yang kuat.

Faktor-faktor yang memengaruhi mata uang eksotis berbeda dari mata uang utama.

- Nasib mata uang utama akan bergantung pada kesehatan ekonominya dan perbedaan suku bunga, sementara mata uang eksotis seringkali dipengaruhi oleh perubahan lanskap politik. Pada masa ketidakstabilan politik, mata uang eksotis akan mengalami depresiasi dengan cepat.<sup>3</sup>
- Selain likuiditas yang lebih rendah, mata uang eksotis umumnya memiliki volatilitas yang lebih tinggi karena sifat ekonomi negara terkait yang rapuh. Karena itu, investor yang ingin memperdagangkannya akan membutuhkan margin yang lebih tinggi di akun pialang mereka untuk mengantisipasi perubahan signifikan yang merugikan dalam nilai tukar mata uang tersebut.

Sepanjang 2026 IFRS Board mempersiapkan SAK IFRS baru atau amandemen SAK IFRS yang akan berlaku awal 2027 sbb :

- Perubahan Laporan Laba/Rugi dan LAK dalam amandemen IFRS 18 (Presentation and Disclosure in Financial Statements).
- Pelonggaran kewajiban pengungkapan entitas-anak nir-pertanggungjawaban-publik dalam amandemen IFRS 19 (Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures). Broader Trends and Future Issues

Sepanjang 2026, Yayasan IFRS (IFRS Foundation) akan

- Meningkatkan aspek pengungkapan-nirwajib buatan The International Sustainability Standards Board (ISSB) tentang kelestarian & iklim versi IFRS S1 (General Sustainability Disclosures) and IFRS S2 (Climate-related Disclosures) mungkin berlakupada 2026 atau 2027.
- Pembangunan-transformatif lingkungan pelaporan LK berbasis digital berformat XBRL (Digital Transformation).
- Meneruskan berbagai proyek belum-rampung antara-lain ; pengukuran biaya-ter-amortisasi , masalah goodwill dan penurunan-nilai dalam proses penyatuan-entitas (business combinations ).



### AGENDA IPSASB

IPSAS adalah SAK bagi entitas sektor publik, baik pemerintahan maupun swasta. Di NKRI belum ada Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik untuk subsektor swasta ( non-pemerintahan) seperti yayasan, LSM, partai politik, dewan gereja, dan entitas nirlaba lain. IAI adalah lembaga

paling afdol untuk mendirikan Dewan SAK Sektor-Publik Non-Pemerintahan.

Menurut info AI, isu panas akuntansi sektor publik adalah Pelaporan Kelestarian (The "hot issues" for International Public Sector Accounting Standards (sustainability reporting) terutama terkait pelaporannya pada LK cq materialitas.

Awal tahun 2026 ditandai awal berlaku-efektif IPSAS 49, *Retirement Benefit Plans* untuk imbalan skema-pensiun di sektor-publik, *Amendments to IPSAS Standards: Specific IFRIC Interpretations* , *Amendments to IPSAS Standards: Specific IFRIC Interpretations* yang mengaitkan IPSAS dengan panduan IFRIC, penyempurnaan IPSAS Accounting Standards, Volume 10 pada bulan Maret 2025 sebagai hasil temuan-penyempurnaan IPSAS sepanjang tahun 2025, Terkait Sustainability Reporting, Dewan Standar IPSAS telah menyetujui IPSASB SRS 1, *Climate-related Disclosures*. IPSASB sedang meriset keaneka-ragaman-hayati untuk akuntansi sektot-publik. IPSASB sedang merumuskan berbagai aspek-teknis dan aspek-konseptual tentang bagaimana cara (how) menyajikan LK sektor-publik IPSASB sedang menyusun panduan-tidak-wajib tentang pengambilan-keputusan entitas-LK untuk batas-materialitas LK nya. Tahun 2026 adalah tahun penguatan hubungan Standard IPSAS dengan *Government Finance Statistics Manual 2014* (GFSM) dan sebuah konsep-publikasian akan segera diedarkan. 1 Januari 2026 IPSASB mengganti kepemimpinan IPSASB dengan Thomas Müller-Marqués Berger .

## AGENDA UNI EROPA

Agenda akuntansi utama Uni Eropa (UE) untuk tahun 2026 berfokus pada pelaporan keberlanjutan melalui penerapan *EU Taxonomy Regulation* dan kemungkinan perubahan terkait audit dan pelaporan keuangan digital.

Berikut adalah berbagai butir penting dalam agenda akuntansi Uni Eropa pada tahun 2026:

- Penerapan Regulasi Taksonomi UE yang Disempurnakan: Perubahan pada *EU Taxonomy Regulation* yang bertujuan untuk menyederhanakan pelaporan keberlanjutan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Perusahaan dapat memilih untuk menerapkan aturan baru ini untuk tahun buku yang dimulai pada tahun 2025, tetapi akan menjadi wajib untuk tahun buku yang dimulai setelah tahun 2025. Perubahan ini memperkenalkan bentuk/*template* pelaporan yang lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar, yang memiliki opsi untuk menunda penerapan hingga tahun 2028.
- Standar Pelaporan Keberlanjutan Korporat (CSRD): Perusahaan publik yang sangat besar telah diwajibkan untuk mengungkapkan pelaporan keberlanjutan sesuai dengan *European Sustainable Reporting Standards* (ESRS) sejak awal tahun 2025, dan perusahaan besar lainnya akan menyusul pada awal tahun 2026.
- Standar Audit Keberlanjutan: Komisi Eropa berencana untuk mengadopsi standar jaminan keberlanjutan Eropa pada bulan Oktober 2026. Sementara itu, otoritas pengawas nasional (seperti di Irlandia) sedang mempertimbangkan standar sementara, seperti *International Standard on Sustainability Assurance 5000* (ISSA 5000).
- Tinjauan *Digital Operational Resilience Act* (DORA): Pada Januari 2026, Komisi Eropa akan meninjau apakah auditor wajib dan perusahaan audit harus termasuk dalam cakupan DORA atau apakah persyaratan ketahanan digital harus dimasukkan melalui *Audit Directive*. Digital Operational Resilience Act (DORA) dalam Bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital (UKOD), sebuah regulasi Uni Eropa (UE) yang mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) penting untuk memperkuat ketahanan digital mereka agar dapat bertahan, merespons, dan pulih dari gangguan siber, memastikan stabilitas sektor keuangan Eropa dengan menetapkan standar manajemen risiko TIK, pelaporan insiden, pengujian, dan pengawasan pihak ketiga yang ketat. Tujuan: Menciptakan standar yang seragam di seluruh UE untuk mengelola risiko TIK dan memperkuat ketahanan digital sektor keuangan, melindungi dari serangan siber, kegagalan sistem, dan gangguan. Ruang Lingkup: Berlaku untuk bank, perusahaan investasi, asuransi, penyedia aset kripto, dan penyedia layanan cloud/TIK pihak ketiga yang penting. Persyaratan Utama:
  - Manajemen Risiko TIK: Kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola risiko TIK.
  - Pelaporan Insiden: Pelaporan insiden TIK besar yang cepat dan akurat kepada otoritas pengawas.
  - Pengujian Ketahanan: Pengujian berkala, termasuk pengujian ancaman tingkat lanjut (*threat-led penetration testing*), untuk menguji kemampuan respons.
  - Pengawasan Pihak Ketiga: Pengawasan langsung terhadap penyedia layanan TIK kritis oleh Otoritas Pengawas Eropa (ESA).

- Berbagi Informasi: Mendorong berbagi intelijen siber antar lembaga keuangan.
- Tanggal Penting: DORA mulai berlaku pada 17 Januari 2023, dengan masa transisi hingga 17 Januari 2025 untuk implementasi penuh.
- Anggaran Tahunan UE 2026: Dokumen kerja dan pedoman terkait adopsi dan implementasi anggaran tahunan Uni Eropa untuk tahun 2026 juga merupakan bagian dari agenda administratif dan akuntansi UE secara umum.

Singkatnya, fokus utama agenda akuntansi UE untuk tahun 2026 adalah konsolidasi dan implementasi kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang ekstensif, bersamaan dengan evaluasi peran auditor dalam lanskap digital dan keberlanjutan yang terus berkembang.

Agenda utama Uni Eropa (UE) terkait akuntansi pemerintahan untuk tahun 2026 berfokus pada transparansi fiskal, pengelolaan anggaran jangka panjang (2021-2027), dan potensi harmonisasi standar akuntansi sektor publik (IPSAS) di antara negara-negara anggota.

Berbagai butir penting dalam agenda akuntansi pemerintahan UE tersebut:

- Pengelolaan Anggaran Tahunan 2026: Dewan dan Parlemen Eropa telah mencapai kesepakatan sementara mengenai anggaran tahunan UE untuk tahun 2026. Anggaran ini merupakan bagian dari Kerangka Keuangan Multitahunan (MFF) yang lebih besar untuk periode 2021-2027 dan diprioritaskan untuk pendanaan riset, keamanan, perlindungan perbatasan, dan pemulihan pascapandemi COVID-19 di bawah inisiatif *Next Generation EU*.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pengawasan terhadap belanja publik dan kepatuhan terhadap peraturan fiskal UE. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan integritas data keuangan di tengah digitalisasi.
- Harmonisasi Standar Akuntansi: Meskipun penerapan standar akuntansi sektor publik internasional (*International Public Sector Accounting Standards* - IPSAS) secara penuh bervariasi di setiap negara anggota, UE secara umum terus mendorong reformasi keuangan publik dan harmonisasi standar untuk memastikan perbandingan data fiskal yang lebih baik antar negara anggota.
- Reformasi Profesi Akuntan: Terdapat juga agenda di tingkat negara anggota untuk mereformasi peraturan yang mengatur organisasi profesi akuntan publik, dengan fokus pada peningkatan kualitas, etika, dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Secara ringkas, agenda akuntansi pemerintahan UE 2026 lebih merupakan kelanjutan dari upaya reformasi dan harmonisasi yang sedang berlangsung, daripada inisiatif baru yang spesifik untuk tahun tersebut.

## **AGENDA BENELUX**

Agenda akuntansi pemerintahan di negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) untuk tahun 2026 kemungkinan besar berfokus *pada harmonisasi dengan standar akuntansi sektor publik Uni Eropa (EU IPSAS)* yang sedang dalam proses pengembangan. Negara-negara Benelux secara kolektif bekerja sama dalam berbagai prioritas, dan digitalisasi serta keberlanjutan adalah area fokus utama mereka, yang juga memengaruhi pelaporan keuangan publik.

Poin-poin utama agenda tersebut mencakup:

- Implementasi Standar Uni Eropa: Dorongan utama dalam akuntansi sektor publik di Eropa adalah pengembangan dan penerapan European Public Sector Accounting Standards (EPSAS). Meskipun tanggal penerapan penuh EPSAS dapat bervariasi, negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Benelux, secara aktif terlibat dalam proses harmonisasi ini.
- Digitalisasi dan Transparansi: Terdapat fokus yang kuat pada modernisasi dan digitalisasi pelaporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sejalan dengan agenda digitalisasi Benelux yang lebih luas.
- Pelaporan Keberlanjutan: Meningkatnya penekanan pada pelaporan isu-isu keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam akuntansi sektor publik, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pemerintah.
- Manajemen Anggaran: Pada tingkat nasional, setiap negara (Belgia, Belanda, Luksemburg) akan memiliki siklus dan prioritas anggaran spesifik untuk tahun 2026, yang menentukan fokus operasional bagi departemen akuntansi pemerintah masing-masing.

## AGENDA SKANDINAVIA

Agenda utama terkait akuntansi pemerintahan di Norwegia dan Belgia untuk tahun 2026 berfokus pada *digitalisasi dan transparansi fiskal*, meskipun tidak ada agenda spesifik yang ditemukan untuk "Skandinavia" secara keseluruhan sebagai satu entitas tunggal.

### Norwegia.

Fokus utama Norwegia adalah pada penyusunan dan implementasi *Anggaran Nasional 2026* yang transparan.

- Pemerintah Norwegia secara aktif menyusun dan mengelola anggaran nasionalnya untuk tahun 2026, yang melibatkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran fiskal.
- Tidak ada perubahan mendasar dalam standar akuntansi pemerintahan yang diumumkan secara publik untuk tahun 2026, agenda utamanya lebih kepada pengelolaan kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah.

### Belgia

Agenda akuntansi pemerintahan Belgia untuk tahun 2026 ditandai dengan reformasi digital yang signifikan:

- **Faktur Elektronik (E-invoicing) Wajib:** Mulai awal tahun 2026, semua pemilik usaha yang dikenakan PPN di Belgia wajib menggunakan platform Peppol (Pan-European Public Procurement Online) untuk mengirim dan menerima faktur. Sistem ini didasarkan pada standar Eropa (EN 16931) dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi bisnis-ke-bisnis (B2B), yang juga berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah.
- **Efisiensi Administrasi:** Terdapat juga rencana jangka panjang untuk merasionalisasi infrastruktur administrasi perpajakan, dengan separuh kantor pajak di Belgia dijadwalkan tutup pada tahun 2030, menunjukkan dorongan untuk proses yang lebih terpusat dan digital.

## **Denmark.**

Agenda utama akuntansi di Denmark untuk tahun 2026 berfokus pada kelanjutan *digitalisasi wajib pembukuan* dan perluasan *pelaporan ESG* (Environmental, Social, and Governance).

Poin-poin penting dalam agenda akuntansi pemerintahan Denmark pada tahun 2026 meliputi:

- Undang-Undang Pembukuan Digital (Digital Bookkeeping Act): Persyaratan pembukuan digital secara penuh akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 untuk bisnis yang tidak wajib menyerahkan laporan tahunan (seperti perusahaan perseorangan) jika omzet bersihnya melebihi DKK 300.000 selama dua tahun berturut-turut. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Denmark untuk mendigitalkan administrasi bisnis dan meningkatkan transparansi.
- Perluasan Pelaporan ESG: Daftar perusahaan yang diwajibkan untuk menyerahkan laporan ESG akan diperluas pada tahun 2026 untuk mencakup perusahaan publik yang lebih kecil dan perusahaan menengah. Rincian spesifiknya masih dalam tahap penyelesaian, tetapi tenggat waktu pelaporan untuk tahun buku 2026 adalah pada tahun 2027.
- Anggaran dan Kebijakan Keuangan: Pemerintah Denmark juga akan mengimplementasikan Undang-Undang Keuangan (Finance Act) 2026, yang mencakup perubahan dan keringanan pajak yang signifikan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Anggaran pemerintah diproyeksikan akan surplus sekitar 1,20 persen dari PDB pada tahun 2025-2026.

Secara umum, agenda ini mencerminkan komitmen Denmark terhadap kepatuhan terhadap standar Uni Eropa (EU) dan modernisasi proses keuangan melalui digitalisasi dan fokus yang meningkat pada tanggung jawab lingkungan dan sosial.

## **Skandinavia.**

Istilah "Skandinavia" umumnya mencakup Norwegia, Swedia, dan Denmark. Negara-negara ini memiliki pendekatan reformasi sektor publik yang serupa, sering kali berkoordinasi dengan standar Uni Eropa (meskipun Norwegia bukan anggota UE, mereka sering menyelaraskan regulasi). Namun, tidak ada "agenda akuntansi pemerintahan" tunggal yang mengikat ketiga negara tersebut. Setiap negara memiliki agenda fiskal dan reformasi digitalnya sendiri.

Secara umum, tren di negara-negara Eropa, termasuk negara-negara yang disebutkan, adalah menuju *e-invoicing wajib dan persyaratan pelaporan digital* untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Untuk informasi lebih rinci mengenai inisiatif spesifik akuntansi sektor publik di wilayah ini, disarankan untuk merujuk langsung ke situs web resmi pemerintah negara-negara Benelux atau Sekretariat Jenderal Benelux yang mengoordinasikan kerja sama regional.

## **AGENDA KANADA**

Agenda akuntansi utama yang memengaruhi pasar modal Kanada pada tahun 2026 melibatkan penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) baru dan persyaratan kecukupan modal baru untuk lembaga keuangan.

Berikut adalah rincian agenda akuntansi untuk pasar modal Kanada pada tahun 2026:

### **Standar Akuntansi (IFRS) di Kanada**

Kanada mengadopsi IFRS untuk perusahaan publik. Beberapa pembaruan standar IFRS yang akan berlaku efektif atau memerlukan persiapan implementasi pada tahun 2026 meliputi:

- Amendemen IFRS 9 dan IFRS 7: Amendemen mengenai Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan serta Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.
- IFRS 18 (Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan): Meskipun standar baru ini efektif berlaku pada 1 Januari 2027, perusahaan di pasar modal Kanada perlu memulai persiapan implementasinya pada tahun 2026, terutama karena standar ini menetapkan persyaratan keseluruhan untuk penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- IFRS 19 (Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan): Standar ini juga berlaku efektif pada 1 Januari 2027, dan persiapan awal mungkin diperlukan pada tahun 2026.

### **Persyaratan Regulasional Kanada**

Kantor Superintendent Institusi Keuangan (OSFI) Kanada memberlakukan pedoman kehati-hatian untuk memastikan stabilitas sistem keuangan:

- Persyaratan Kecukupan Modal (CAR) 2026: Pedoman yang diperbarui, termasuk persyaratan modal untuk risiko pasar (Bab 9), mulai berlaku efektif pada November 2025/Januari 2026.
- Persyaratan Kecukupan Likuiditas (LAR): Pedoman terkait likuiditas juga telah diperbarui dan akan terus relevan pada tahun 2026.

### **Sektor Publik Kanada**

Untuk entitas di sektor publik, Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Kanada (PSAB) memberlakukan kerangka kerja pelaporan baru:

- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Sektor Publik: Kerangka kerja baru ini dan model pelaporan baru (PS 1202) berlaku efektif untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 1 April 2026.

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal Kanada harus memantau pembaruan dari Dewan Standar Akuntansi Kanada (AcSB) dan regulator terkait seperti OSFI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan pedoman yang berlaku.

### **Akuntansi Pemerintahan Kanada**

Agenda utama akuntansi pemerintahan Kanada untuk tahun 2026 berfokus pada penerapan *kerangka konseptual baru dan model pelaporan baru* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Kanada (PSAB). Standar baru ini berlaku efektif untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2026.



## Perubahan Utama dalam Akuntansi Pemerintahan Kanada 2026

- **Kerangka Konseptual Baru:** PSAB memperkenalkan kerangka konseptual baru untuk pelaporan keuangan di sektor publik, yang menggantikan kerangka sebelumnya dari tahun 2003. Kerangka ini berfungsi sebagai fondasi untuk standar berbasis prinsip yang konsisten.
- **Model Pelaporan Baru:** Model pelaporan baru ini mencakup panduan dan ilustrasi laporan keuangan. Salah satu perubahan penting adalah pengenalan istilah "liabilitas non-keuangan", yang dibedakan dari liabilitas keuangan berdasarkan cara penyelesaiannya.
- **Penerapan Dini Diperbolehkan:** Entitas sektor publik didorong untuk meninjau persyaratan baru ini dan menilai dampaknya terhadap laporan keuangan mereka secara proaktif, karena penerapan dini diizinkan jika Kerangka Konseptual diadopsi secara bersamaan.
- **Fokus pada Akuntabilitas dan Transparansi:** Kantor Auditor Jenderal Kanada juga berencana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan melalui pendekatan baru untuk memantau dan melaporkan implementasi rekomendasi audit di tahun fiskal 2026–2027.

Secara ringkas, entitas sektor publik Kanada perlu mempersiapkan diri untuk perubahan signifikan dalam cara mereka menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka mulai tahun 2026, dengan penekanan kuat pada kerangka konseptual dan model pelaporan yang diperbarui. Informasi lebih rinci dapat ditemukan di situs web resmi *CPA*.

## AGENDA AFGANISTAN

Tidak ada badan penetap standar akuntansi atau standar akuntansi yang dapat diberlakukan secara spesifik untuk sektor publik di Afghanistan yang saat ini diketahui publik.

. Laporan Transparansi Fiskal 2024 dari Departemen Luar Negeri AS menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam transparansi fiskal dan akuntabilitas di Afghanistan.

Informasi yang tersedia menunjukkan hal-hal berikut:

- **Tidak Ada Badan Penetap Standar:** Saat ini tidak ada badan penetap standar akuntansi atau audit yang mapan di Afghanistan, sehingga tidak ada standar akuntansi yang dapat diberlakukan untuk sektor swasta maupun publik.
- **Krisis Administrasi Publik:** Administrasi publik Afghanistan menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya struktur yang kuat, korupsi, kurangnya profesionalisme, dan ketiadaan aturan serta hukum, yang berdampak langsung pada manajemen keuangan publik.
- **Rekomendasi Internasional:** Laporan Bank Dunia merekomendasikan agar praktik akuntansi dan audit sektor publik Afghanistan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional, khususnya *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik.
- **Otoritas Audit Tertinggi:** Sebuah entitas yang menamakan dirinya "Kantor Audit Tertinggi" (Supreme Audit Office) mengumumkan akan mulai beroperasi pada tahun 2022, tetapi tidak jelas di bawah undang-undang mana badan tersebut berfungsi dan belum mempublikasikan audit apa pun.
- **Pelaporan Saat Ini:** Beberapa BUMN secara independen mempublikasikan pendapatan dan pengeluaran, tetapi secara keseluruhan, kementerian dan institusi

sektor publik Afghanistan perlu membuat dokumen anggaran yang lengkap dan andal tersedia untuk publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional.

Oleh karena itu, tidak ada "agenda standar akuntansi pemerintahan" yang jelas dan dapat diakses publik untuk Afghanistan pada saat ini, karena kerangka kerja standar tersebut tampaknya belum ada atau belum berfungsi penuh.

## AGENDA PAKISTAN

Agenda standar akuntansi pemerintahan Pakistan saat ini berfokus pada transisi dari basis kas ke basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS). Badan utama yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Pakistan adalah *Auditor General of Pakistan (AGP)*, yang memiliki wewenang konstitusional di bawah Pasal 170 Konstitusi Pakistan untuk memberikan arahan mengenai bentuk, metode, dan prinsip akuntansi.

Proses ini dilakukan melalui kerja sama dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Pengawas Umum Akun (*Controller General of Accounts/CGA*), dan didukung oleh bantuan teknis dari Bank Dunia.



Agenda standar akuntansi pemerintahan Pakistan yang sedang berlangsung mencakup:

- **Transisi ke Akuntansi Berbasis Akrual:** Ini adalah fokus utama. Pakistan saat ini menggunakan Model Akuntansi Baru (New Accounting Model/NAM) berbasis kas yang dimodifikasi, dan sedang dalam proses transisi penuh ke sistem akuntansi berbasis akrual yang selaras dengan IPSAS.
- **Penyelarasan dengan IPSAS:** Standar baru yang dikembangkan dan akan diterapkan setelah persetujuan Presiden Pakistan, dirancang agar sejalan dengan praktik IPSAS yang diakui secara global.
- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Tujuan utama reformasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan pemerintah, memberikan gambaran yang lebih akurat dan lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran, serta memperkuat tata kelola keuangan publik.
- **Penerapan Seragam:** Kerangka akuntansi baru ini dirancang untuk berlaku seragam di tingkat pemerintah federal, provinsi, dan lokal setelah diimplementasikan.

Secara ringkas, agenda saat ini adalah "revolusi fiskal" yang signifikan untuk memodernisasi pelaporan keuangan sektor publik Pakistan agar memenuhi standar internasional dan meningkatkan kepercayaan publik. Untuk informasi terkini dan detail lebih lanjut mengenai proses penetapan standar, Anda dapat merujuk pada situs web resmi Auditor-General of Pakistan atau FABS Directorate CGA Pakistan.

Pakistan secara aktif mengadopsi *Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)* sebagai bagian dari agenda standar akuntansi dan pasar modalnya, yang diamanatkan oleh regulator. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan menarik investor global.

Agenda Standar Akuntansi IFRS di Pakistan

- **Adopsi Wajib:** Pakistan mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan publik dan entitas tertentu, diamanatkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Pakistan (SECP) berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 2017.
- **Badan Pengatur:** Institut Akuntan Publik Pakistan (ICAP) adalah badan yang mengatur standar akuntansi di negara tersebut, bekerja sama dengan SECP untuk mengimplementasikan IFRS.
- **Penerapan Bertahap:** Penerapan IFRS dilakukan secara bertahap. Misalnya, IFRS untuk Entitas Kecil dan Menengah (IFRS for SMEs) disetujui untuk diadopsi efektif mulai periode keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, menggantikan standar akuntansi lokal sebelumnya untuk menengah.
- **Standar yang Belum Diadopsi Penuh:** Meskipun Pakistan mematuhi sebagian besar IFRS (38 dari 41 standar internasional), negara ini belum menerapkan IAS 15 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, namun IFRS 15 diadopsi), IAS 29 (Pelaporan Keuangan di Ekonomi Hiperinflasi), dan IAS 41 (Agrikultur) secara penuh pada semua sektor.
- **Standar Terkini:** SECP terus memperbarui adopsi standar baru. Contohnya, pada tahun 2025, SECP mengumumkan adopsi IFRS 18 (Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan) dan IFRS 19 (Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik) yang berlaku efektif mulai Januari 2027, serta mempertimbangkan adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS S1 dan S2.

Penerapan IFRS sangat penting bagi pasar modal Pakistan (*Pakistan Stock Exchange/PSX*) karena:

- **Kepercayaan Investor:** Standar akuntansi berkualitas tinggi yang diterima secara internasional seperti IFRS diharapkan dapat memperkuat pasar modal dengan meningkatkan kepercayaan investor lokal dan internasional terhadap laporan keuangan perusahaan tercatat.
- **Transparansi dan Komparabilitas:** IFRS meningkatkan transparansi laporan keuangan, membuatnya lebih mudah dipahami dan dibandingkan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya secara global, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi.
- **Akses ke Modal Global:** Perusahaan yang mematuhi IFRS memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dari investor internasional dan mengakses pasar modal global.
- **Persyaratan Regulator:** Sebagai anggota Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), SECP berkomitmen untuk memastikan perusahaan publik menggunakan standar akuntansi berkualitas tinggi yang diakui secara internasional untuk memenuhi persyaratan keanggotaan dan menjaga integritas pasar.

## AGENDA AS

- Dua SAK berlaku efektif tahun 2026 adalah GASB Statement No. 103, *Financial Reporting Model Improvements* pelaporan LK, info komparative realisasi APBN/D, penyajian dana-proprietari (bertujuan meningkatkan ketaataazasan / konsistensi penyajian dana-proprietary dalam LK pemerintahan, subsidi terkatagori dalam pendapatan/beban nonoperasional dalam LK pemerintahan; GASB Statement No. 104, *Disclosure of Certain Capital Assets* adalah kewajiban pengungkapan tambahan

untuk capital assets, termasuk pengungkapan terpisah/tersendiri aset sewa-guna-usaha, hak-pakai aset (intangible right-to-use assets) , pengaturan teknologi penggunaan-informasi berdasar pesanan (SBITs;Subscription-Based Information Technology Arrangements),aset-modal tersedia untuk dijual(Capital assets held for sale) yang harua di evaluasi dan di-ungkapkan tiap periode pelaporan.

#### Berbagai agenda Tahun 2026

- Aset infrastruktur (Infrastructure Assets ) sedang di atur ulang apakah masih-boleh menggunakan hampiran-termodifikasi (modified approach), draft publikasian diharapkan selesai Triwukan I 2026 .
- Ketidak-pastian kelangngan-entitas dan derita-keuangan berat (Going Concern Uncertainties and Severe Financial Stress) menyangkut pengungkapan kemampuan mempertahankan kesinambungan-entitas LK ( going concern, dengan batas-waktu konsep-publikasian selesai Juni 2026, proyek selesai tuntas Juni 2027.
- Pemutahiran Panduan Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan AS (Implementation Guidance Update—2026) terkait Statement No. 103.

#### Agenda FASB tahun 2026 fokus pada isu-isu akuntansi baru seperti klarifikasi akuntansi



kripto aset (termasuk *stablecoin*) sebagai setara kas, finalisasi standar tentang pertukaran utang, program kredit lingkungan, dan pembaruan taksonomi GAAP tahunan, selain terus mengkaji penerapan standar yang sudah ada seperti akuntansi sewa dan kerugian kredit, dengan simposium riset khusus pada bulan April.

#### Proyek Utama dan Finalisasi (Q1 2026)

- Accounting for Debt Exchanges: Finalisasi *Accounting Standards Update* (ASU).
- Accounting for Environmental Credit Programs: Finalisasi ASU.

#### Isu yang Sedang Berlangsung (Ongoing)

- Transfer Aset Kripto: FASB akan membahas isu akuntansi untuk transfer aset kripto.
- Klasifikasi Aset Digital: Peninjauan ulang aturan akuntansi untuk aset digital, khususnya *stablecoin*, apakah memenuhi syarat sebagai "setara kas".

### AGENDA RUSIA

Untuk resolusi defisit APBN, agenda akuntansi 2026 Russia terfokus pada pengendalian dan transparansi perpajakan, upaya penurunan pajak-pertambahan-nilai dan integrasi perangkat lunak nasional untuk meningkatkan kepatuhan , peningkatan fungsi oversight, program cuci-cuci ( whitewashing) untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian, dengan berbagai tema sbb :

- Perencanaan transparansi keuangan bertarget tercapai tahun 2030.

- SAK Rusia (Russian Accounting Standards (RAS) ) tetap mengambil hikmah pada IFRS untuk perusahaan-komersial ukuran-besar, misalnya dewasa ini dengan perhatian kepada IFRS 16, 17, 18.
- Upaya penyederhanaan sistem-pajak nilai-tambah bagi UMKM cq penyederhanaan sistem pelaporan pajak UMKM.
- Pengurangan batas pembebasan wilayah pajakpertambahan nilai dari 60 juta menjadi 10 juta Rubel untuk memperluas pemajakan.
- Peningkatan digitalisasi dan otomatisasi sistem-perangkat-lunak nasional untuk modernisasi manajemen , terutama sistem pelaporan otomatis.
- Konvergensi SAK Rusia kepada IFRS , misalnya IFRS 18.
- Melanjutkan proyek penerapan SAP yang diperbaharui.
- Upaya meningkatkan pendapatan negara dengan memperkecil ruang penghindaran pajak, mengurangi jumlah transaksi menggunakan uang kartal ,meregulasi mata-uang digital APBN dan memperbaiki transparansi aliran uang.

## AGENDA RRT

Pada tahun 2026 , negara RRT meneruskan pembangunan SAK RRT, khususnya

- Adopsi SAK Kontrak Asuransi versi IFRS ke dalam Chinese Accounting Standards for Business Enterprises (CAS) yang berlaku awal-tahun 2026 , berdampak kepada entitas-komersial Asuransi dan entitas-komersial pengguna produk/jasa asuransi yang diberlakukan awal tahun 2026.
- Pembangunan dan harmonisasi Pelaporan Lingkungan,Sosial dan Tata-kelola (environmental, social & governance atau ESG ) serta penerapannya dalam aspek Standar Pengungkapan Korporasi tentang Kelestarian Lingkungan-Hidup (Corporate Sustainability Disclosure Standards (CSDS) ) .
- CDS RRT akan dikaitkan dengan IAS terbitan International Sustainability Standards Board (ISSB).
- Perusahaan-Publik tertentu ternyata telah diwajibkan mengungkapkan data lingkungan-hidup tertentu , yang selanjutnya di masa-depan akan diperluas kepada perusahaan-swasta non-publik dan UKM tertentu.
- Audit lingkungan-hidup ( berjulukan *greenwashing*) dan pengungkapan LK tentang aspek lingkungan-hidup (ESG disclosures ) (Assurance and Scrutiny) merupakan konsekuensi selanjutnya.
- Implementasi SAK untuk UU Nilai-Tambah ( Implementation of the New VAT Law and Regulations) berlaku efektif awal 2026 ,memnita entitas-bisnis menelaah-ulang pemrovisian transaksi-berdimensi pajak pertambahan-nilai.
- Dampak potensial dari berbagai faktor geopolitis dan pemeriksaan mendalam dan rinci ( ) terkait BUMN yang diperiksa KAP Besar dunia terkait pemantauan *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) cq Potential Impact of Geopolitical Factors and Auditor Scrutiny*

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diatur oleh Kementerian Keuangan RRT dan terus berkembang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pada tahun 2026, kerangka kerja akuntansi pemerintah Tiongkok didasarkan pada serangkaian standar yang ada, dan tidak ada informasi yang menunjukkan perubahan besar yang berlaku spesifik pada tanggal 1 Januari 2026, selain penyesuaian yang sedang berlangsung.

## Kerangka Umum Standar Akuntansi Pemerintahan RRT:

- Penerbitan Standar: Standar Akuntansi Tiongkok untuk Perusahaan (CAS) untuk entitas bisnis dan standar sektor publik lainnya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RRT. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk memastikan entitas sektor publik menggunakan dana publik secara efisien.
- Konvergensi: Meskipun Tiongkok memiliki aturan akuntansi sendiri, terdapat konvergensi substansial antara CAS dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Namun, perbedaan dalam implementasi dan interpretasi praktis tetap ada.
- Fokus Saat Ini: Pada periode sekitar tahun 2026, pemerintah Tiongkok berfokus pada reformasi fiskal dan moneter, termasuk pengelolaan utang pemerintah daerah dan penerbitan obligasi pemerintah khusus jangka ultra-panjang.

## AGENDA JEPANG

Standar akuntansi pemerintahan Jepang tidak tunggal, tetapi didasarkan pada sistem multi-standar yang menggabungkan GAAP Jepang (J-GAAP), yang dikembangkan oleh ASBJ, dengan opsi penerapan IFRS (International Financial Reporting Standards) dan US GAAP untuk perusahaan tercatat, serta mengakomodasi regulasi dari Hukum Komersial, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Jepang memiliki pendekatan konservatif, berorientasi pada kreditor dan stabilitas, meskipun berupaya konvergensi dengan IFRS.

### Lembaga Penetapan Standar

- Dewan Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) (Accounting Standards Board of Japan): Lembaga independen sektor swasta yang mengembangkan J-GAAP dan berupaya menyelaraskan dengan IFRS.
- Badan Layanan Keuangan (FSA): Lembaga pemerintah yang mengesahkan standar yang dikembangkan ASBJ.

### Pilar Utama Sistem

- J-GAAP: Prinsip akuntansi dasar yang berlaku umum di Jepang, menekankan kebenaran, keadilan, konsistensi, dan kehati-hatian.
- IFRS & US GAAP: Perusahaan terdaftar dapat memilih untuk menggunakan Designated IFRS atau US GAAP untuk laporan konsolidasi.
- Sistem Hukum Akuntansi Tiga Segitiga: Berdasarkan Hukum Komersial (Kementerian Kehakiman), Undang-Undang Pasar Modal (Kementerian Keuangan), dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan.

### Karakteristik Khas

- Orientasi: Cenderung lebih berorientasi pada kreditor dan stabilitas daripada investor (seperti IFRS).
- Konservatif: Lebih menekankan pada pengukuran biaya historis dan stabilitas nilai daripada nilai wajar (fair value).
- Multi-Standar: Memungkinkan keseimbangan antara kebutuhan global dan kepentingan nasional Jepang.

## Perkembangan Terkini

- Jepang aktif dalam konvergensi dengan IFRS melalui "Perjanjian Tokyo" (2007) dan terus meningkatkan adopsi IFRS.
- Jepang juga telah merilis standar pelaporan keberlanjutan perdana yang selaras dengan IFRS

Standar Akuntansi Jepang (GAAP Jepang) untuk 2026 tetap berdasar pada prinsip tiga pilar (komersial, pajak, pasar modal) yang dikembangkan oleh ASBJ, namun mengalami evolusi melalui adopsi sukarela IFRS 17 di sektor asuransi dan penerapan aturan pajak digital baru terkait pajak global minimum (QDMTT/UTPR) untuk perusahaan multinasional, serta fokus pada digitalisasi dan pengungkapan ESG, yang mencerminkan adaptasi terhadap tren global sambil menjaga kekhasan domestik.

## Pilar Utama GAAP Jepang (Tetap Relevan)

1. Akuntansi Komersial: Berfokus pada perlindungan kreditur.
2. Akuntansi Pajak: Mengikuti hukum pajak untuk tujuan perpajakan.
3. Akuntansi Pasar Modal: Menerapkan standar yang lebih dekat dengan IFRS untuk perusahaan publik.

## Perkembangan Utama Tahun 2026

- IFRS 17: Jepang mengizinkan penerapan IFRS 17 secara sukarela mulai tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, terutama untuk perusahaan asuransi, sebagai respons terhadap standar internasional.
- Pajak Global (Pilar Dua OECD): Jepang mengesahkan undang-undang yang menerapkan aturan QDMTT (*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*) dan UTPR mulai 1 April 2026, mewajibkan pelaporan keuangan khusus untuk grup multinasional (MNE) untuk memastikan pajak minimum global 15%.
- Digitalisasi & ESG: Pemerintah mendeklarasikan 2026 sebagai "Tahun Digital," mendorong integrasi aset digital dan mempercepat transformasi digital, termasuk dalam pelaporan akuntansi yang lebih menekankan aspek ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola).

## Perubahan Pengungkapan (2026)

- Dewan Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) memperkenalkan perubahan pada standar pengungkapan yang akan mulai berlaku secara sukarela untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi.

Sebagai kesimpulan, Standar Akuntansi Jepang pada tahun 2026 tetap merupakan sistem unik yang menggabungkan aturan domestik dengan adaptasi IFRS dan tantangan pajak internasional, khususnya dalam konteks digitalisasi dan pajak global, yang diatur oleh ASBJ dan Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA).

Standar akuntansi pemerintahan Jepang memiliki kerangka kerja tersendiri yang berbeda dari Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS), meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik

.

Standar Akuntansi Pemerintahan Jepang Pemerintah Jepang, baik di tingkat nasional maupun lokal, telah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual yang dikembangkan secara domestik. Standar ini dikelola dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga di Jepang, sering kali terkait erat dengan lingkungan bisnis dan peraturan perpajakan lokal yang unik di negara tersebut.

Jepang tidak sepenuhnya mengadopsi IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) untuk pemerintahnya; mereka mempertahankan pendekatan multi-standar untuk menyeimbangkan kebutuhan global dan kepentingan nasional. Badan-badan lokal di Jepang sedang mengkaji kemungkinan penerapan IPSAS, namun adopsi belum sepenuhnya terimplementasi.

Karakteristik utama dari standar akuntansi pemerintahan Jepang meliputi:

- **Basis Akrual:** Banyak entitas pemerintah Jepang telah mengadopsi basis akrual untuk pelaporan keuangan mereka, mirip dengan pendekatan yang dianjurkan oleh IPSAS.
- **Kerangka Domestik:** Standar ini adalah bagian dari Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum Jepang (*Japanese Generally Accepted Accounting Principles - J-GAAP*) yang disesuaikan untuk sektor publik, dan *tidak secara langsung mengadopsi IPSAS secara keseluruhan*.
- **Pengaruh Lokal:** Standar ini mencerminkan kebutuhan spesifik dan kerangka hukum Jepang, yang mungkin berbeda dari praktik internasional.

Terkait isu IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*), perbandingan singkat dan perbedaan utama antara standar akuntansi pemerintahan Jepang dan IPSAS terletak pada sumber standar dan tingkat harmonisasi internasionalnya, sbb:

#### Fitur

	Standar Akuntansi Pemerintahan Jepang	IPSAS
<b>Pengembang</b>	Entitas domestik Jepang (misalnya ASBJ untuk sektor swasta, dengan penyesuaian pemerintah).	IPSASB, badan penetap standar internasional.
<b>Adopsi</b>	Digunakan secara wajib di Jepang, mencerminkan hukum dan kebutuhan lokal.	Diadopsi secara sukarela oleh lebih dari 80 negara dan berbagai organisasi internasional untuk harmonisasi global.
<b>Basis Akuntansi</b>	Sebagian besar berbasis akrual.	Sebagian besar berbasis akrual, dengan beberapa opsi berbasis kas.
<b>Tujuan</b>	Memenuhi persyaratan peraturan dan pelaporan domestik Jepang.	Meningkatkan komparabilitas dan transparansi secara global.

Sebagai ringkasan, Jepang menggunakan kerangka kerja akuntansi sektor publik domestik yang dikembangkan sendiri, yang mungkin memiliki banyak prinsip akrual yang sama dengan IPSAS, tetapi tidak secara formal mengadopsi IPSAS sebagai standar nasionalnya.

#### AGENDA INDIA

Standar akuntansi pemerintahan India saat ini tidak mengadopsi IPSAS secara langsung, tetapi mengadopsi dan mengkonvergensi standar akuntansi yang berbasis pada *IFRS (Ind AS)* untuk sektor swasta, sementara pemerintah pusat dan daerah sedang mengkaji adopsi



akuntansi akrual berbasis IPSAS, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih dalam proses implementasi dan menghadapi tantangan. Konteks India:

- Sektor Swasta: Mengadopsi Ind AS (Indian Accounting Standards) yang substansial dikonvergensi dengan IFRS (International Financial Reporting Standards), bukan IPSAS, untuk perusahaan besar, termasuk yang terdaftar di bursa saham.
- Sektor Publik (Pemerintah):
  - Pemerintah India (pusat dan negara bagian) telah mengakui konsep akuntansi berbasis akrual (accrual accounting).
  - Komite Standar Akuntansi untuk Badan Lokal sedang mengkaji IPSAS untuk potensi adopsi, menunjukkan minat pada standar global tersebut.
  - Implementasi IPSAS di sektor publik India masih dalam tahap awal atau kajian, dengan banyak tantangan yang dihadapi seperti dukungan legislatif dan sumber daya.

Sebagai kesimpulan, India bergerak menuju standar akuntansi internasional, tetapi implementasinya berbeda antara sektor swasta (Ind AS/IFRS) dan sektor publik (mengkaji IPSAS). Jadi, jawabannya adalah tidak sepenuhnya adopsi IPSAS, melainkan dalam tahap eksplorasi untuk sektor publik, sementara sektor swasta sudah mengadopsi standar yang selaras dengan IFRS.

## **AGENDA SAUDI ARABIA**

Arab Saudi telah mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Peralihan ini merupakan bagian dari reformasi manajemen keuangan publik yang lebih luas di bawah inisiatif Saudi Vision 2030.

Poin-poin penting mengenai adopsi IPSAS di Arab Saudi:

- Basis Akuntansi Akrual: Arab Saudi telah beralih dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual penuh, menggunakan IPSAS sebagai dasarnya.
- Penerapan Penuh: Penerapan IPSAS dilaporkan telah selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2024.
- Tujuan: Adopsi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik, serta membantu pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah.
- Badan Pengatur: Kementerian Keuangan dan Pusat Akuntansi Akrual Arab Saudi memimpin proses implementasi ini, dengan dukungan dari Organisasi Akuntan Publik Bersertifikat Saudi (SOCPA).
- Kontribusi Internasional: Kementerian Keuangan Arab Saudi juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dan berkontribusi pada pengembangan standar akuntansi internasional.

Arab Saudi mengadopsi IFRS secara luas untuk pasar modalnya, terutama untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham, tetapi dengan modifikasi lokal melalui SOCPA (Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants) untuk menyesuaikan dengan hukum Syariah dan ketentuan lokal, seperti Zakat. Semua perusahaan yang bertanggung jawab kepada publik (PIE) diwajibkan menggunakan IFRS yang didukung SOCPA, sementara entitas lain mengikuti standar SOCPA yang selaras dengan IFRS.

- Adopsi Penuh IFRS: Perusahaan yang terdaftar (termasuk bank dan asuransi) di Bursa Efek Saudi wajib menerapkan IFRS.
- Modifikasi SOCPA: SOCPA menambahkan persyaratan dan pengungkapan tambahan untuk mengakomodasi hukum Syariah dan peraturan lokal, terutama terkait Zakat.
- Standar Lokal: Untuk hal-hal yang tidak dicakup IFRS, SOCPA mengeluarkan standar lokal yang juga selaras dengan IFRS.

## **AGENDA AUSTRALIA**

Agenda akuntansi utama Australia untuk tahun 2026 berfokus pada pelaporan keberlanjutan (ESG), reformasi anti pencucian uang (AML/CTF), integrasi kecerdasan buatan (AI), dan konsolidasi badan penetapan standar.

- Pelaporan Keberlanjutan (ESG) Wajib: Perusahaan besar dan menengah diwajibkan untuk mulai melaporkan risiko keuangan terkait iklim dan keberlanjutan. Pelaporan ini selaras dengan standar global (IFRS S1 dan S2 dari ISSB) dan diterapkan secara bertahap, dengan entitas Kelompok 2 mulai berlaku untuk tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2026.
- Reformasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/CTF): Mulai 1 Juli 2026, akuntan yang terlibat dalam layanan tertentu (seperti pendirian perusahaan atau perwalian, pengelolaan dana klien) akan termasuk dalam "sektor penjaga gerbang" dan wajib mendaftar ke AUSTRAC, menerapkan program AML/CTF formal, dan melakukan uji tuntas klien.
- Konsolidasi Badan Standar: Pemerintah bermaksud untuk menggabungkan Financial Reporting Council (FRC), Australian Accounting Standards Board (AASB), dan Auditing and Assurance Standards Board (AUASB) menjadi satu badan tunggal yang direncanakan beroperasi pada atau setelah 1 Juli 2026.

### **Tren dan Prioritas Praktik**

- Integrasi AI dan Otomasi: Kecerdasan buatan dan otomasi semakin diadopsi untuk menyederhanakan proses dan mengurangi tugas berulang. Akuntan didorong untuk memanfaatkan AI secara etis dan efektif untuk meningkatkan efisiensi.
- Peran Akuntan sebagai Penasihat Strategis: Dengan tugas kepatuhan yang semakin otomatis, peran akuntan bergeser ke arah penyediaan layanan penasihat strategis, termasuk perkiraan arus kas, perencanaan anggaran, dan saran pertumbuhan bisnis.
- Keterampilan Non-Teknis (Soft Skills): Keterampilan komunikasi, empati, dan strategi yang efektif menjadi semakin penting bagi para profesional akuntansi untuk berinteraksi dengan klien dan staf secara bermakna.

Australian Accounting Standards Board (AASB) menyelenggarakan konsultasi agenda untuk periode 2027-2031 selama Maret 2026 untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan mengenai prioritas pelaporan keuangan dan keberlanjutan di masa depan. Untuk informasi lebih rinci mengenai standar dan inisiatif terkini, dapat mengunjungi situs web resmi Australian Accounting Standards Board (AASB) dan CPA Australia.

## AGENDA INGGRIS

IASB berlokasi di London, Inggris. Inggris juga telah mengadopsi standar IFRS versi mereka sendiri (UK-adopted IFRS) sejak Brexit, dengan UK Endorsement Board (UKEB) yang bertanggung jawab untuk mengesahkan standar baru untuk digunakan di Inggris.

Agenda akuntansi utama di Inggris untuk tahun 2026 berfokus pada perubahan signifikan pada Standar Akuntansi Inggris (UK GAAP), yang menyelaraskan aturan pelaporan keuangan dengan standar internasional, serta inisiatif dalam pelaporan keberlanjutan dan digitalisasi perpajakan.

Dewan Pelaporan Keuangan (FRC) telah menerbitkan amandemen signifikan terhadap UK GAAP, khususnya FRS 102, yang berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Perubahan utama meliputi:

- Akuntansi Sewa (Lease Accounting): Sebagian besar sewa akan dicatat dalam neraca keuangan penyewa (lessee), mirip dengan standar internasional IFRS 16. Ini mengakhiri sebagian besar pembiayaan luar neraca (off-balance sheet financing) untuk sewa operasi.
- Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition): Model pengakuan pendapatan baru, yang diselaraskan dengan IFRS 15, akan diterapkan, termasuk versi yang disederhanakan untuk entitas mikro (FRS 105).
- Transparansi Komite Audit: Komite audit diharapkan untuk mendeskripsikan tindakan yang diambil untuk memenuhi "Standar Minimum Komite Audit dan Audit Eksternal", termasuk kebijakan mengenai layanan non-audit, efektivitas auditor, dan penilaian independensi.
- Pemerintah Inggris diperkirakan akan menyelesaikan dua Standar Pelaporan Keberlanjutan Inggris (UK SRS) yang pertama pada awal tahun 2026. Setelah tersedia, perusahaan dapat mengadopsi standar ini secara sukarela.

### Agenda Pemerintah dan Perpajakan

- Laporan Keuangan Pemerintah: Departemen Keuangan Inggris (HM Treasury) telah menerbitkan *Government Financial Reporting Manual* (FReM) untuk tahun 2026-27, yang menetapkan panduan akuntansi teknis untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- *Making Tax Digital* (MTD): Dari 6 April 2026, pedagang tunggal dan pemilik properti dengan pendapatan tahunan di atas £50.000 wajib menggunakan perangkat lunak yang kompatibel dengan MTD untuk PPN (VAT) dan Pajak Penghasilan (Income Tax).
- IFRS 18: Meskipun IFRS 18 (*Presentation and Disclosure in Financial Statements*) dari Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) baru efektif pada Januari 2027, entitas pelapor IFRS perlu menerapkan standar tersebut secara retrospektif, yang berarti data komparatif tahun 2026 harus disiapkan di bawah standar baru.

Perubahan-perubahan ini mendorong perusahaan dan departemen pemerintah untuk merencanakan dan mengkaji dampak transisi terhadap laporan keuangan, metrik kinerja utama (seperti EBITDA), dan sistem internal. Informasi lebih rinci dapat ditemukan di situs resmi Financial Reporting Council (FRC) dan GOV.UK.

## PROGRAM 2026 DSAK IAI

Rencana Kerja Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2026 merupakan bagian dari **Rencana Strategis IAI 2022-2026**. Fokus utama adalah melanjutkan konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) serta menangani isu-isu pelaporan keuangan yang sedang berkembang, terutama terkait keberlanjutan.

Meskipun dokumen "Rencana Kerja" tahunan spesifik untuk tahun 2026 tidak tersedia secara publik, prioritas dan agenda utama DSAK IAI dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Prioritas Utama dan Area Fokus:

- Penerapan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi: Ini adalah proyek utama yang melibatkan partisipasi aktif DSAK IAI dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perwakilan industri asuransi untuk memastikan kelancaran implementasi.
- Standar Pelaporan Keberlanjutan: IAI telah mengesahkan pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) untuk memastikan standar keberlanjutan di Indonesia selaras dengan perkembangan global, yang menjadi area fokus penting di tahun 2026.
- Konvergensi IFRS: Secara berkelanjutan, DSAK IAI memantau dan memberikan tanggapan publikasi dari *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *IFRIC* (badan interpretasi IFRS) untuk menjaga SAK tetap relevan dengan standar internasional.
- Pengembangan Buletin Implementasi (BI): DSAK IAI secara berkala mengesahkan dan mensosialisasikan Buletin Implementasi untuk memberikan panduan praktis mengenai penerapan PSAK tertentu, seperti yang terlihat dengan Volume 4 mengenai Transaksi Unit Karbon dan volume lainnya.
- Peningkatan Kompetensi Akuntan: Melalui berbagai kegiatan pendidikan profesionalisme berkelanjutan (PPL) dan sertifikasi yang tercantum dalam Katalog IAI 2026, IAI berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme akuntan Indonesia, sejalan dengan mandat regulasi seperti PP No. 43 Tahun 2025.

*Jakarta , 31 Desember 2025*